

## **BAB III**

### **DESKRIPSI WILAYAH**

Penelitian ini mengenai kesiapan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Palangkaraya dalam mempersiapkan kota menuju kota cerdas, sehingga dalam bab ini peneliti akan menguraikan gambaran umum terkait deskripsi wilayah yang akan diteliti yakni deskripsi wilayah Kota Palangkaraya beserta instansi terkait.

#### **A. Gambaran Umum Wilayah Kota Palangkaraya**

Secara umum Kota Palangkaraya dapat dilihat sebagai sebuah Kota yang memiliki 3 (tiga) wajah yaitu wajah perkotaan, wajah pedesaan dan wajah hutan. Kondisi ini memberikan tantangan tersendiri bagi Pemerintah Kota Palangkaraya dalam membangun Kota Palangkaraya. Kondisi ini semakin menantang lagi bila mengingat luas Kota Palangkaraya yang berada pada urutan ke-3 di Indonesia yaitu 2.853,52 Km<sup>2</sup>.<sup>102</sup>



**Gambar 3.1 Lambang Kota Palangkaraya**

**Sumber:**<https://palangkaraya.go.id/selayang-pandang/lambang-kota/>

---

<sup>102</sup><https://palangkaraya.go.id/selayang-pandang/gambaran-umum/> diakses pada 12 Oktober 2019.

## 1. Sejarah Kota Palangkaraya

Terbentuknya Provinsi Kalimantan Tengah melalui proses yang cukup panjang sehingga mencapai puncaknya pada tanggal 23 Mei 1957 dan dikuatkan dengan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957, yaitu tentang pembentukan Daerah Swatantra Tingkat 1 Kalimantan Tengah. Sejak saat itu Provinsi Kalimantan Tengah resmi sebagai daerah otonom. Sedangkantiang pertama Pembangunan Kota Palangkaraya dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia Ir.Sukarno pada 17 Juli 1957 yang diikuti dengan diresmikannya monumen ibu kota Provinsi Kalimantan Tengah di Kota Palangkaraya.<sup>103</sup>

Latar belakang terbentuknya Pemerintahan Kota Palangkaraya adalah satu kesatuan dengan dibentuknya pemerintahan Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan kebijakan Undang-Undang (UU) No 10 tahun 1957. Kebijakan ini disahkan pada 23 Mei 1957 secara resmi sebagai daerah provinsi bagian Negara kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya, pada 11 Mei 1959 pemerintah memutuskan kebijakan baru yakni UU no 27 tahun 1959 dimana memuat penetapan 5 daerah yang merupakan bagian Provinsi Kalimantan Tengah dengan Kota Palangkaraya sebagai ibu kota provinsi.<sup>104</sup>

Keberadaan kebijakan atau UU tersebut juga didukung oleh kebijakan dari kementrian terkait yakni Kementrian Dalam Negri (Kemendagri) melalui Surat Keputusan Kemendagri No Des.52/12/2-206 pada 22 Desember 1956 dimana kebijakan ini mengatur terkait pergantian kedudukan Kota

---

<sup>103</sup> *Ibid.*

<sup>104</sup> *Ibid.*

Palangkarya sebagai ibu kota provinsi dimana sebelumnya yakni Kota Banjarmasin. Hal ini menjadi awal mula tata kelola administrasi pemerintahan di Kota Palangkaraya. Namun sebelumnya terdapat proses adminitratif dimana Kecamatan Kahayan Tengah syang berlokasi di Pahandut mendapat mandat dan tugas untuk menyiapkan kota praja Palangkaraya sebagai cikal bakan Kota Palangkaraya.<sup>105</sup>

Adanya pergantian satus adminitrasi Kecamaran Kahayan tengah yang menjadi cikal bakal Kota Palangkaraya mengalami babak baru setelah dilakukan pelantikan gubernur Kalimantan Tengah yang baru yakni Bapak Tjilik Riwut pada 23 Desember 1959. Selanjutnya, pada 11 Mei 1960 dilakukan pembentukan kecamatan baru yakni Kecamatan Palangka Khusus sebagai persiapan Kota Praja Palangkaraya. Lalu pada 20 Juni 1962 Kecamatan Palangka Khusus ini resmi menjadi Kota Praja Administratif Palangkaraya yang dipimpin oleh W. Conrad.<sup>106</sup>

Kotapraja Administrasi Palangkaraya terdiri atas 4 wilayah kecamatan dan 17 kampung. Lebih lanjut, atas dasar pembagian wilayah administratif inilah maka kota praja palangkaraya dapat menjadi daerah otonom yang selanjutnya lagalisasinya yakni pada 12 Juni 1965 dengan melalui kebijakan pemerintah yaitu UU no 5 tahun 1965 tentang penetapan daerah baru yakni Kotapraja Administratif Palangkaraya, maka terbentuklah Kotapraja Palangkaraya yang Otonom.<sup>107</sup>

---

<sup>105</sup> *Ibid.*

<sup>106</sup> *Ibid.*

<sup>107</sup> *Ibid.*

## 2. Geografis Kota Palangkaraya

Kota Palangkaraya secara geografis terletak pada 113°30'-114°07' Bujur Timur dan 1°35'-2°24' Lintang Selatan, dengan luas wilayah 2.853,52 Km<sup>2</sup> (267.851 Ha) dengan topografi terdiri dari tanah datar dan berbukit, dengan kemiringan kurang dari 40%. Secara administrasi Kota Palangkaraya berbatasan dengan: Sebelah Utara dengan Kabupaten Gunung Mas. Sebelah Timur dengan Kabupaten Pulang Pisau. Sebelah Selatan dengan Kabupaten Pulang Pisau, dan sebelah Barat dengan Kabupaten Katingan.<sup>108</sup>

Wilayah Kota Palangkaraya terdiri dari 5 Kecamatan (lihat gambar 3.2) yaitu Kecamatan Pahandut (luas 119,37 km<sup>2</sup>), Kecamatan Sebangau (luas 641,51 km<sup>2</sup>), Kecamatan Jekan Raya (luas 387,53 km<sup>2</sup>), Kecamatan Bukit Batu (luas 603,16 km<sup>2</sup>) dan Kecamatan Rakumpit (luas 1.101,95 km<sup>2</sup>). Pada tabel 3.1 dibawah ini menjelaskan luas kawasan hutan dan penggunaan lainnya di wilayah Kota Palangkaraya, jenis penggunaan terdiri dari kawasan lindung dan kawasan budidaya dengan masing-masing penjelasan luas hektare yang digunakan, data ini diambil pada tahun 2017 oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kota Palangkaraya.

---

<sup>108</sup> <https://palangkaraya.go.id/selayang-pandang/geografis/> diakses pada 13 Oktober 2019.

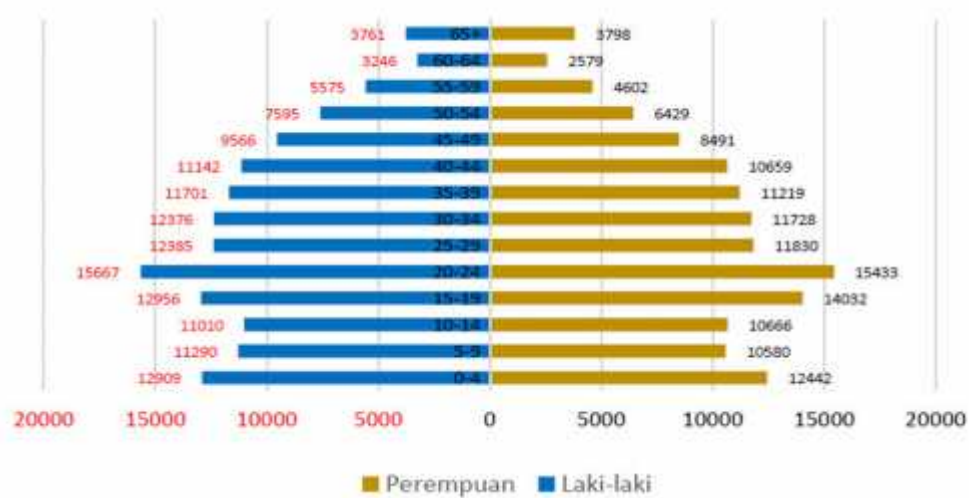
JENIS PENGGUNAAN	LUAS (HA)
<b>A. KAWASAN LINDUNG</b>	
1. Daerah Sempadan Sungai	2.403,40
2. Hutan Lindung	10.105,34
3. Suaka Alam	1.771,13
4. Taman Nasional Darat	63.816,40
5. Cagar Alam Darat	726,20
<b>B. KAWASAN BUDIDAYA</b>	
1. Area Penggunaan Lainnya (APL)	41.209,62
2. Hutan Produksi dapat Dikonservasi (HPK)	90.722,15
3. Hutan Produksi (HP)	74.595,06
<b>JUMLAH</b>	<b>285.349,30</b>

**Sumber:** Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kota Palangkaraya, 2017.

**Gambar 3.2** Peta Administrasi Kota Palangkaraya

### 3. Jumlah Penduduk

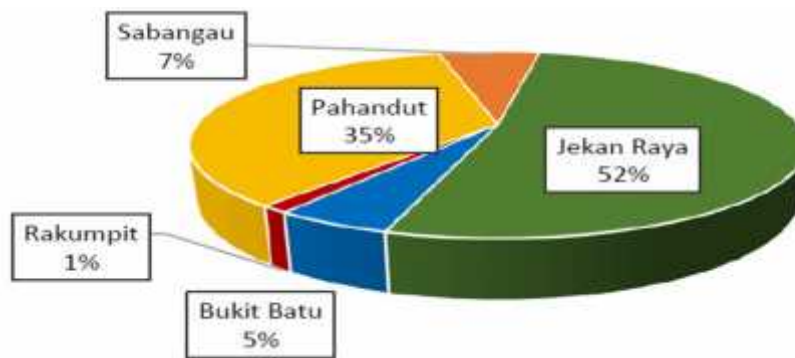
Jumlah penduduk Kota Palangkaraya Tahun 2017 sebanyak 275.667 orang yang terdiri dari 141.179 orang laki-laki dan 134.448 orang perempuan. Penduduk terbanyak terdapat di Kecamatan Jekan Raya dengan 52,09% (lihat gambar 3.4), hal ini membuat Kecamatan Jekan Raya menjadi kecamatan terpadat dimana terdapat 370 orang setiap km<sup>2</sup>. Jumlah rumah tangga di Kota Palangkaraya Tahun 2017 sebanyak 72.663 rumah tangga dimana tiap rumah tangga mempunyai rata-rata anggota rumah tangga sebanyak tiga hingga empat orang<sup>109</sup>, dijelaskan pada gambar 3.3 dibawah ini.



**Gambar 3.3** Jumlah Penduduk Kota Palangkaraya Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin, 2017

**Sumber:** <https://palangkaraya.go.id/selayang-pandang/jumlah-penduduk/>

<sup>109</sup> <https://palangkaraya.go.id/selayang-pandang/jumlah-penduduk/> diakses pada 13 Oktober 2019.



**Gambar 3.4** Presentase Penduduk Menurut Kecamatan di Kota Palangkaraya, 2017

Sumber: <https://palangkaraya.go.id/selayang-pandang/jumlah-penduduk/>

#### 4. Penataan Ruang

Dari segi penataan ruang dan lahan yang dilakukan di Kota Palangkaraya, dapat diketahui bahwa pada tahun 2016 yang meliputi sekitar 28% kawasan lindung dan 72% kawasan budidaya. Pada kawasan lindung tersebut yakni meliputi daerah sempadan sungai, hutan lindung, suaka alam, taman nasional, dan cagar alam. Sementara itu, kawasan budidaya yakni meliputi hutan produksi yang dapat dikonservasi dan hutan produksi. Penjabaran mengenai tata ruang Kota Palangkaraya khususnya mengenai penggunaan lahan dapat mengacu pada beberapa aspek berikut ini<sup>110</sup>:



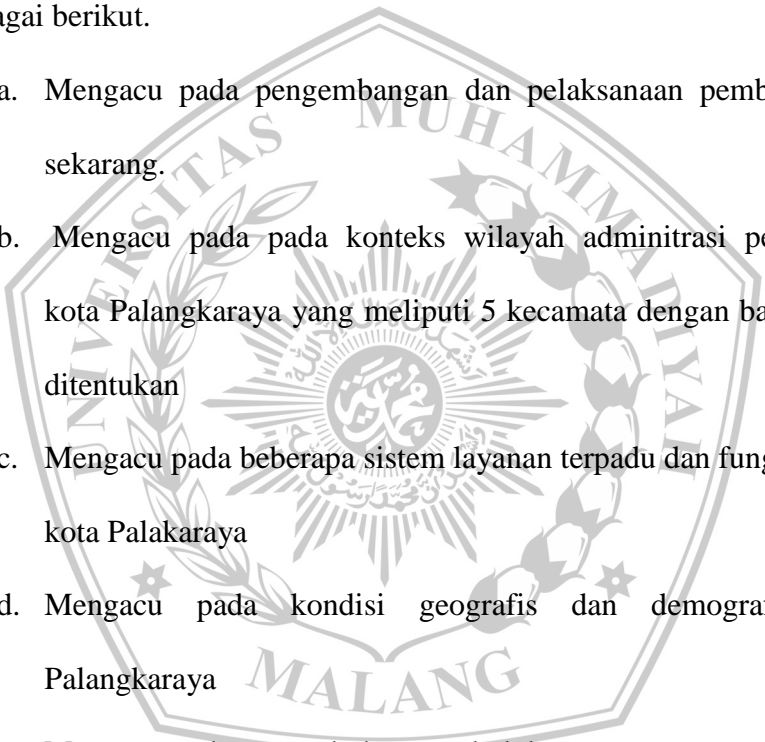
<sup>110</sup> <https://palangkaraya.go.id/selayang-pandang/penataan-ruang/> diakses 13 Oktober 2019.



### **Gambar 3.5** Komposisi Penggunaan Lahan Tahun 2016

**Sumber:** <https://palangkaraya.go.id/selayang-pandang/penataan-ruang/>

Pola Pemanfaatan tata kelola ruang di Kota Palangkaraya dilaksanakan mengikuti tahapan-tahapan tertentu. Selain itu, perlu juga diperhatikan menyangkut batasan tertentu yang meliputi kawasan kegiatan budaya, sosial, dan ekonomi seperti batasan kawasan wilayah lindung. Sehingga dapat dilakukan tata kelola ruang yang terstruktur dan terpadu, dengan rincian sebagai berikut.

- 
- a. Mengacu pada pengembangan dan pelaksanaan pembangunan kota sekarang.
  - b. Mengacu pada konteks wilayah administrasi pemerintahan kota Palangkaraya yang meliputi 5 kecamatan dengan batas yang telah ditentukan
  - c. Mengacu pada beberapa sistem layanan terpadu dan fungsi kawasan di kota Palangkaraya
  - d. Mengacu pada kondisi geografis dan demografis di Kota Palangkaraya
  - e. Mengacu pada pertumbuhan penduduk
  - f. Mengacu pada aspek investasi dan sumber daya potensial seperti pertanian dan pertambangan
  - g. Mengacu dan mementingkan posisi dan peran kota Palangkaraya yang merupakan ibu kota provinsi Kalimantan Tengah dan sebagai pusat kota serta sebagai wilayah transportasi skala nasional.<sup>111</sup>

---

<sup>111</sup> *Ibid.*



## 5. Perekonomian

Kebijakan pembangunan perekonomian di Kota Palangkaraya sebagai acuan dalam pembangunan daerah bersama stakeholder pendukung non pemerintah. Selain itu, pemerintah bersama stakeholder tersebut harus saling berkolaborasi dan bekerja sama dalam menghadapi tantangan pembangunan ekonomi kedepannya yang penuh dengan ketidakpastian. Maka dari itu, terkait pembangunan ekonomi di kota palangkaraya ini BPS melansir beberapa indikator dan kondisi perekonomian dengan rincian sebagai berikut ini.<sup>112</sup>

### a. Ringkasan ekonomi kota Palangkaraya

Produk Domestik Bruto Kota palangkaraya dalam praktiknya mengalami peningkatan. Data tahun 2015 menunjukkan angka 7,2% dengan rincian sebagai berikut ini.

- bidang administrasi pemerintahan, pertanahan, dan jaminan sosial yakni sekitar 1,5%. Aspek ini meningkat jika dibandingkan pada tahun 2014 yang berada di angka 4,7%.
- Bidang perdagangan besar dan eceran yang menyangkut usaha reparasi mobil dan sepeda motor berada pada angka 1,3%
- Bidang konstruksi bear yakni 0,8%.

### b. PDRB kota Palangkarya memiliki peran sekitar 11.3% untuk daerah Provinsi kalimantan Tengah. Jumlah tersebut adalah peringkat ke 3 karena masih kalah dengan kota Waringin Timur yakni 17,2% dan kota Waringan Barat 13,1%

---

<sup>112</sup><https://palangkaraya.go.id/pembangunan/perekonomian/> diakses pada 29 Januari 2020.

Pertumbuhan perekonomian Kota Palangkaraya telah menguat dalam kurun waktu terakhir. Meskipun Pada tahun 2014 terjadi pelemahan sedikit. Hal ini sesuai dengan yang digambarkan sebagai berikut:



Sumber: BPS Kota Palangkaraya (diolah)

**Gambar 3.6** Laju PDRB Kota Palangkaraya Tahun 2011-2015

Sumber: <https://palangkaraya.go.id/pembangunan/perekonomian/>

Perekonomian Palangkaraya mengalami pertumbugan dari rincian 5 tahun tersebut. Pertumbuhan ekonomi yakni memiliki rata-rata 7,53%. Meskipun sempat mengalami pelambatan di periode 2014. Karena memang pertumbuhan ekonomi suatu daerah akan sangat mungkin bersifat naik turun. Hal berikutnya yang tidak kalah penting sebagai pondasi dari perekonomian Kota Palangkaraya adalah aspek struktur perekonomian Kota palangkaraya melalui pengembangan dengan beberapa kategori tertentu sebagai tonggak atau pusat

perekonomian daerah tersebut. Kategori dengan nilai tambah bruto (NTB) terbesar akan menjadi tulang punggung perekonomian suatu daerah dan semakin besar NTB suatu kategori maka semakin besar pula tingkat ketergantungan suatu daerah terhadap kategori ekonomi tersebut. Potensi perekonomian Kota Palangkaraya bertumpu pada beberapa bidang ekonomi tersier yang meliputi bidang perdagangan, angkutan, komunikasi, konstruksi, *finance*, dan beberapa jasa. Sementara bidang pertambangan dan pertanaian dalam praktiknya memiliki kontribusi sekitar 5%.<sup>113</sup>



**Gambar 3.7** Struktur Ekonomi Kota Palangkaraya

Sumber: <https://palangkaraya.go.id/pembangunan/perekonomian/>

Berdasarkan gambar di atas maka dapat dijelaskan secara lebih detail menyangkut pertumbuhan dan perkembangan perekonomian di kota

<sup>113</sup> *Ibid.*

Palangkaraya. Selain itu gambar tersebut juga dapat memberikan penjelasan mengenai ragam kegiatan ekonomi yang memberikan sumbangsih atau dampak bagi pertumbuhan perekonomian kota Palangkaraya di mana kegiatan usaha menjadi struktur ekonomi yang paling dominan di kota ini. Sementara mbentuk kegiatan lain seperti pertanian, kehutanan, perikanan dan lainnya memiliki sumbangan yang dapat dikatakan rendah yakni kurang dari 55 pada PDRB.

Di samping itu, pada gambar tersebut juga menandakan dan menjadi informasi yang jelas bahwa di kota Palangkaraya, kegiatan perekonomian tidak selalu bergantung pada sektor pertambangan. Hal ini sangat penting. Karena sektor pertambangan merupakan sektor yang penuh dengan resiko, baik kerusakan alam dan resiko keberlanjutan. Eksploitasi yang berlebihan sumber daya alam justru buruk terhadap keberlanjutan pertumbuhan ekonomi, karena sumber daya alam pertambangan merupakan sumber daya yang dapat habis, karena tidak dapat diperbarui. Lebih lanjut, pertumbuhan ekonomi juga mendapat pengaruh yang cukup signifikan melalui kegiatan perdagangan barang dan jasa di masyarakat yang memberikan kontribusi besar pada pihak terkait.<sup>114</sup>

Dalam konteks pertumbuhan ekonomi, pada umumnya kota Palangkaraya memiliki 5 kategori yakni sebagai berikut.<sup>115</sup>

- a. Kategori pertama, kategori ini disebut juga sebagai kategori O yang mana terdiri atas bidang adminitrasi pemerintah, pertanahan, dan jaminan sosial wajib

---

<sup>114</sup> *Ibid.*

<sup>115</sup> *Ibid.*

- b. Kategori kedua disebut kategori G yang meliputi perdagangan besar dan eceran serta kegiatan usaha reparasi mobil dan sepeda motor
- c. Kategori ketiga, disebut Kategori F terdiri dari Konstruksi.
- d. Kategori keempat, disebut Kategori C terdiri dari Industri Pengolahan.
- e. Kategori kelima, disebut Kategori H terdiri dari Transportasi dan Pergudangan.

## **6. Pariwisata**

Wadah pelestarian budaya yang ada di Kota Palangkaraya sekaligus sebagai objek wisata yang pertama adalah Museum Balanga, merupakan museum yang berada di Kota Palangkaraya, yang mana keberadaannya ini berkiprah sebagai lembaga pelestarian, pendokumentasian, serta penyajian berbagai koleksi peninggalan budaya Suku Dayak dan segala yang berkaitan dengan sejarah kehidupan Suku Dayak. Seperti etnografika, barang-barang warisan leluhur dayak yang banyak memiliki kekuatan magis. Museum Balanga juga menyimpan berbagai alat tradisional yang biasa dipakai oleh suku dayak pada jaman dahulu seperti Mihing (sebuah penangkap ikan tradisional), baju Sakarut atau baju Karungkong Sulau, atau juga baju Basurat yang biasa dipakai pada upacara ritual, senjata-senjata suku dayak seperti Mandau, Sumpitan, Duhung, dan sebagainya.<sup>116</sup>

---

<sup>116</sup> <https://palangkaraya.go.id/potensi-daerah/pariwisata/> diakses pada 09 Februari 2020.



**Gambar 3.8** Gedung Museum Balanga

**Sumber:** <https://palangkaraya.go.id/potensi-daerah/pariwisata/>

Objek wisata yang kedua yakni Taman Wisata Alam Bukit Tangkiling, objek wisata ini berjarak sekitar  $\pm 34$  Km dari pusat Kota Palangkaraya dengan waktu tempuh kira-kira 45 menit dengan menggunakan kendaraan roda dua maupun roda empat, dan untuk mencapai ke puncak bukit dengan melewati jalan setapak. Lokasi objek wisata ini secara geografis terletak di Kelurahan Banturung dan Kelurahan Tangkiling. Kecamatan Bukit Batu. Luas keseluruhan kawasan wisata ini adalah 2.594 Ha, dengan rincian Cgar Alam seluas 2.061 Ha dan Taman Wisata Alam seluas 533 Ha.





**Gambar 3.9** Wisata Bukit Tangkiling

**Sumber:** <https://palangkaraya.go.id/potensi-daerah/pariwisata/>

Ketiga yaitu objek wisata Batu Banama, selain menawarkan panorama alam yang indah, objek wisata ini juga bias dikategorikan sebagai wisata yang mengandung unsur religious dikarenakan pada lokasi area wisata ini terdapat Pura Agung Sali Paseban/Satya Dharma. Disamping itu legenda mengenai terjadinya Batu Banama itu sendiri, yang apabila dilihat dari sisi samping mirip seperti sebuah bahtera yang terdampar.<sup>117</sup>



**Gambar 3.10** Objek Wisata Batu Banama

**Sumber:** <https://palangkaraya.go.id/potensi-daerah/pariwisata/>

<sup>117</sup> *Ibid.*



Keempat merupakan objek wisata buatan yang ada di Kota Palangkaraya yang bernama Taman Wisata Fantasy Beach, objek wisata ini berjarak sekitar  $\pm$  21 Km dari pusat kota dengan waktu tempuh kira-kira 20 menit menggunakan kendaraan roda dua maupun roda empat. Lokasi objek wisata yang dikelola oleh pihak swasta ini menawarkan berbagai hiburan/permainan seperti, memancing, fling fox, sepeda air, outbond, water boom, jetski dan pada acara tertentu menghadirkan panggung hiburan berupa pertunjukan musik. Tempat wisata ini juga memberikan fasilitas sebagai tempat simulasi penyelamatan darurat di air yang biasanya dilakukan oleh PMR (Palang Merah Remaja), Pramuka, Polri, TNI, dan lainnya.<sup>118</sup>



**Gambar 3.11** Wisata Buatan *Fantasy Beach*

**Sumber:** <https://palangkaraya.go.id/potensi-daerah/pariwisata/>

Objek wisata yang kelima yaitu rumah khas adat Dayak, Huma Betang/Rumah Betang yang artinya rumah panjang atau rumah besar. Obyek wisata ini jika dilihat dari nama nya merupakan sebuah rumah yang memiliki ukuran besar sehingga dapat dikunjungi oleh sekitar lebih dari 30an wisatawan. Obyek ini memang menunjukkan karakteristik khas dari

---

<sup>118</sup> *Ibid.*

masyarakat adat suku dayak yang dalam kehidupan sehari-harinya tinggal dalam bentuk keluarga besar. Akan tetapi jenis rumah adat ini mulai sulit ditemui, karena perkembangan jaman. tetapi masih ada 1 rumah adat betang yang terletak di Jl Panjaitan Kota Palangkaraya. Rumah adat inilah yang sering digunakan oleh pemerintah maupun pihak swasta apabila mengadakan kegiatan yang bernuansakan kebudayaan dan kesenian khas dayak. Sehingga kearifan lokal masyarakat dayak melalui rumah adat tradisionalny masih dalam dilestarikan.



**Gambar 3.12** Huma Betang (Rumah Betang)

Sumber: <https://palangkaraya.go.id/potensi-daerah/pariwisata/>

Masyarakat suku dayak merupakan salah satu masyarakat yang memiliki toleransi sangat tinggi dalam kehidupan sehari-hari, khususnya menyangkut perbedaan agama. Hal tersebut dapat terjadi, karena sudah tercermin dalam praktik rumah adat betang dimana di dalam suatu keluarga besar tidak jarang terdiri atas beragam agama baik Islam maupun Nasrani. Karena kedua agama inilah yang banyak dianut oleh masyarakat suku dayak. Selain itu tidak jarang pula terdapat masyarakat berkeyakinan kepercayaan

asli masyarakat dayak. Oleh karena itu, rumah adat ini menggambarkan filosofi kehidupan yang rukun penuh kegotongroyongan.<sup>119</sup>

Keenam yakni objek wisata Sandung, objek wisata ini merupakan salah satu benda peninggalan leluhur ciri khas Kalimantan Tengah yakni berupa makam yang berbentuk rumah kecil atau yang disebut Sandung. Di Kota palangkaraya sendiri terdapat Sandung Ngabe Sukah, yang mana Sandung ini merupakan makam pendiri Kota Palangkaraya. Sandung adalah bangunan yang terdiri atas tiang kayu atau beton, digunakan untuk tempat penyimpanan tulang orang meninggal, yang mana sebelum dipindahkan ke Sandung tersebut sebelumnya harus melewati upacara adat yang bernama Tiwah.<sup>120</sup> Sandung biasanya banyak terdapat di daerah-daerah pedalaman Kalimantan Tengah, yang mana masyarakatnya masih banyak mempercayai kepercayaan leluhur, Sandung-sandung tersebut biasanya didirikan di halaman rumah atau di kelompokan ke suatu wilayah (seperti kompleks pemakaman umum).



**Gambar 3.13** Sandung Ngabe Sukah

Sumber: <https://palangkaraya.go.id/potensi-daerah/pariwisata/>

---

<sup>119</sup> *Ibid.*

<sup>120</sup> *Ibid.*

Objek wisata yang ketujuh yaitu Arboretum Nyaru Menteng yang terletak di Jl. Tjilik Riwut Km 28 dari Kota Palangkaraya menuju Kota Sampit. Luas obyek wisata ini yakni sekitar 65,2 Ha, merupakan kawasan pelestarian plasma nuftah ekosistem hutan rawa yang termasuk ke tipe hutan tropika dataran rendah dengan kondisi tanah berawa dan bergambut. Di Arboretum sendiri terdapat berbagai jenis tumbuhan yang dapat digolongkan ke dalam 43 famili dengan jumlah spesies 139 jenis, termasuk jenis tumbuhan langka. Disamping itu, di kawasan ini juga terdapat berbagai jenis burung, biawak, ular, monyet dan juga orangutan.<sup>121</sup>

Arboretum Nyaru Menteng adalah salah satu pusat penangkaran orangutan yang masuk ke dalam *Borneo Orangutan Survival Foundation (BOSF)* yang terletak di wilayah Kalimantan Tengah. Pada awalnya tempat ini digunakan untuk “*Nyaru Menteng Orangutan Project*” yaitu sebuah kegiatan untuk menyelamatkan Orangutan beserta primata dan hewan lainnya yang dilindungi. *Nyaru Menteng Orangutan Project* dipimpin oleh Lone Droscher. Lone Droscher menghabiskan masa selama 4 tahun menjadi relawan di Tanjung Putting dalam kegiatan penyelamatan bayi-bayi Orangutan sebelum akhirnya memutuskan untuk mendirikan sendiri sebuah kegiatan penyelamatan Orangutan tersebut.<sup>122</sup>

---

<sup>121</sup> *Ibid.*

<sup>122</sup> <http://www.getborneo.com/nyaru-menteng-kalimantan-tengah/> diakses pada 09 Februari 2020.





**Gambar 3.14** Wisata Arboretum Nyaru Menteng

Sumber: <https://palangkaraya.go.id/potensi-daerah/pariwisata/>

Kedelapan yakni objek wisata susur sungai. Obyek wisata ini merupakan obyek wisata yang berkonsep perahu khas daerah dengan bentuk yang khas pula. Hal inilah yang menjadi daya tarik wisata dari obyek wisata susur sungai, mengingat Kota Palangkaraya juga dialiri oleh sungai yang besar. Perahu wisata ini merupakan perahu yang lengkap dan cukup besar dengan fasilitas ruang makan, tempat duduk bagi wisatawan, kamar mandi, tempat membeli makanan dan minuman ringan serta perpustakaan. Fasilitas inilah yang menjadi daya dukung kedua dari obyek wisata perahu dan susur sungai. Fasilitas yang nyaman menjadi wisatawan dapat menikmati liburan dengan nyaman pula. Wisata ini juga dapat digunakan untuk beberapa kegiatan baik pesta maupun pertemuan formal seperti rapat. Wisata susur sungai memiliki empat rute yakni meliputi<sup>123</sup>:

1. Rute lokasi danau tundai, sungai rungan, dan sekitarnya
2. Rute wisata burung elang

<sup>123</sup> <https://palangkaraya.go.id/potensi-daerah/pariwisata/> diakses pada 09 Februari 2020.

3. Rute wisata orang utan
4. Rute wisata pilihan



**Gambar 3.15** Perahu Susur Sungai

Sumber: <https://palangkaraya.go.id/potensi-daerah/pariwisata/>

## **B. Pemerintah Kota Palangkaraya**

### **1. Visi dan Misi**

Selama periode 2018 - 2023, Visi Pembangunan Kota Palangkaraya adalah: “*Terwujudnya Kota Palangkaraya yang Maju, Rukun,, dan Sejahtera Untuk Semua*”.<sup>124</sup>

Misi<sup>125</sup>:

- a. Mewujudkan kemajuan Kota Palangkaraya, *Smart Environment* (lingkungan cerdas) meliputi pembangunan infrastruktur, teknologi informasi, pengelolaan sektor energi, pengelolaan air, lahan, pengelolaan limbah, manajemen bangunan dan tata ruang, transportasi.

<sup>124</sup> <https://palangkaraya.go.id/pemerintahan/visi-misi/> diakses pada 13 Oktober 2019.

<sup>125</sup> RPJMD Kota Palangkaraya Tahun 2018-2023. Hlm: V 4-5.

- b. Mewujudkan kerukunan seluruh elemen masyarakat, *Smart Society* (masyarakat cerdas) meliputi pengembangan kesehatan, pendidikan, kepemudaan, layanan publik, kerukunan dan keamanan.
- c. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kota Palangkaraya, *Smart Economy* (ekonomi cerdas) meliputi pengembangan industri, usaha kecil dan menengah, pariwisata, dan perbankan.

## 2. Struktur Organisasi

Dasar utama penyusunan organisasi perangkat daerah dalam bentuk suatu organisasi adalah adanya urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, yang terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan, namun tidak berarti setiap penanganan urusan pemerintah harus dibentuk ke dalam organisasi tersendiri. Pembentukan perangkat daerah semata-mata didasarkan pada pertimbangan rasional untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah secara efektif dan efisien.<sup>126</sup>

Kota Palangkaraya dipimpin oleh seorang Walikota dan Wakil Walikota dengan masa jabatan 5 Tahun, yang kemudian akan dipilih kembali melalui pemilihan umum. Kota Palangkaraya pada periode 2018-2023 dipimpin oleh Fairid Naparin, SE sebagai Walikota dan Hj. Umi Mastikah, SH sebagai Wakil Walikota.

---

<sup>126</sup> <https://palangkaraya.go.id/pemerintahan/struktur-organisasi/> diakses pada 13 Oktober 2019.





**Gambar 3.16** Walikota dan Wakil Walikota Palangkaraya

Sumber: <https://palangkaraya.go.id/>

Penataan organisasi pemerintahan Kota Palangkaraya dilakukan dengan melakukan strukturisasi pada organisasi perangkat daerah (OPD) yang mendukung kinerja pemerintah kota. Hal ini agar pelaksanaan pemerintahan dapat berjalan strategis sesuai dengan amanat regulasi terkait. Aspek regulai tersebut yakni PP No 41 tahun 2007 dimana dalam konteks penyelenggaraan organisasi pemerintahan diperlukan upaya tata kelola kelembagaan pemerintah daerah yang memiliki relevansi dengan penataan organisasi dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>127</sup>

Lebih lanjut, mengacu pada UU No 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, menyatakan bahwa daerah provinsi dan kota ataupun kabupaten ditetapkan oleh peraturan daerah yang terdiri atas 1) perangkat daerah provinsi; sekretariat daerah; sekretariat DPRD; inspektorat; dinas dan badan. 2) perangkat daerah kabupaten atau kota; sekretariat daerah; sekretariat

<sup>127</sup> *Ibid.*

DPRD, Inspektorat, Dinas dan Badan.<sup>128</sup> Sedangkan pemberian nama/nomenklatur Dinas dan Badan disesuaikan dengan perumpunan dan klasifikasi yang telah ditentukan.

### **C. Sekretariat DPRD Kota Palangkaraya**

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kota Palangkaraya mempunyai kedudukan sebagai unsur dalam memberikan pelayanan terhadap lembaga legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palangkaraya.<sup>129</sup> Lembaga Legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palangkaraya beranggotakan 30 orang yang baru saja dilantik dari hasil pemilihan umum tahun 2019 yang ditetapkan oleh KPU Kota Palangkaraya, dengan masa jabatan 5 (lima) Tahun pada periode 2019-2024.<sup>130</sup>

#### **1. Tugas Pokok dan Fungsi**

Dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) dan Peraturan Daerah Kota Palangkaraya Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangkaraya (Lembaran Daerah Kota Palangkaraya Tahun 2016 Nomor 15), digambarkan bahwa Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dipimpin oleh 1 (satu) orang Sekertaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah/Pejabat Eselon II, 3 (tiga) orang Kepala Bagian/Pejabat Eselon III, dan 6 (enam) orang Kepala Sub Bagian/Pejabat Eselon IV, mempunyai tugas dan fungsi secara teknis

---

<sup>128</sup> *Ibid.*

<sup>129</sup> Rencana Kerja Perubahan Sekretariat DPRD Kota Palangkaraya 2018. Hlm: 17.

<sup>130</sup> 30 Anggota DPRD Kota Palangkaraya Dilantik, Rabu 14/08/2019. [https://kaltengpos.co/berita/-29582-30\\_anggota\\_dprd\\_kota\\_palangka\\_raya\\_dilantik.html](https://kaltengpos.co/berita/-29582-30_anggota_dprd_kota_palangka_raya_dilantik.html) diakses pada 13 Oktober 2019.

operasional bertanggung jawab kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palangkaraya dan secara administrasi bertanggung jawab kepada Walikota Palangkaraya melalui Sekretaris Daerah Kota Palangkaraya.<sup>131</sup>

## 2. Visi dan Misi

Visi merupakan komitmen, upaya merancang dan mengelola perubahan untuk mencapai tujuan perumusan masalah, Visi yang artikulatif akan memberikan arah yang jelas bagaimana mencapai masa depan yang diharapkan dan mengatasi kesenjangan yang terjadi, sehingga pernyataan Visi Sekretariat DPRD Kota Palangkaraya (lihat gambar 3.17) adalah: *“Terciptanya Pelayanan Prima Dalam Mendorong Optimalisasi Kinerja DPRD Kota Palangkaraya”*.<sup>132</sup>

Perumusan Misi mengacu kepada tugas dan wewenang yang telah diberikan Sekretariat DPRD Kota Palangkaraya, adapun Misi yang wajib dijadikan pegangan pelaksanaan tugas seluruh jajaran Sekretariat DPRD Kota Palangkaraya adalah<sup>133</sup>:

- a. Mewujudkan pembangunan dan peningkatan kualitas pelayanan administrasi kepada anggota DPRD
- b. Mewujudkan pembangunan dan peningkatan dalam memberikan fasilitas kepada anggota DPRD
- c. Melaksanakan optimalisasi peran sebagai mediator yang menjembatani hubungan eksekutif dengan legislative di bidang pelayanan
- d. Mewujudkan peningkatan kinerja DPRD

<sup>131</sup> Rencana Kerja Perubahan Sekretariat DPRD Kota Palangkaraya 2018. Hlm: 17.

<sup>132</sup> Dokumentasi pribadi, 18 November 2019.

<sup>133</sup> *Ibid.*

- e. Meningkatkan jalinan kerjasama antara Sekretaris DPRD se-Indonesia.



**Gambar 3.17** Visi Misi Sekretariat DPRD Kota Palangkaraya

**Sumber:** Dokumentasi pribadi

### 3. Struktur Organisasi



**Gambar 3.18** Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Kota Palangkaraya

**Sumber:** Dokumentasi pribadi

#### 4. Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Komisi A, Komisi B, dan Komisi C DPRD Kota Palangkaraya Masa Jabatan 2019-2024

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palangkaraya terpilih dari Partai PDI Perjuangan yaitu Sigit Karyawan Yunianto, sedangkan pimpinan untuk Wakil Ketua I DPRD Kota Palangkaraya berasal dari Partai Golkar yaitu Wahid Yusuf. Sementara posisi Wakil Ketua II DPRD Kota Palangkaraya yang merupakan jatah dari Partai Demokrat yaitu Basirun B. Sahepar.<sup>134</sup>



**Gambar 3.19** Ketua DPRD Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Sigit K Yunianto.

Sumber: <https://www.gesuri.id/pemerintahan/>

##### a. Komisi A (Bidang Pemerintahan dan Keuangan)

**Bidang Tugas:** Urusan pemerintahan bidang Kecamatan dan Kelurahan; Urusan pemerintahan bidang ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; Urusan pemerintahan bidang

<sup>134</sup> <https://mediacenter.palangkaraya.go.id/sigit-wahid-dan-basirun-jadi-unsur-pimpinan-dprd-kota-palangka-raya/> diakses pada 09 Februari 2020.



administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; Penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan; Urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan PTSP; Urusan pemerintahan bidang pertanahan; Urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan bidang kearsipan; Penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian, pendidikan, dan pelatihan; dan Urusan pemerintahan bidang umum yang diselenggarakan oleh Walikota.<sup>135</sup>

**Mitra Kerja:** Sekretariat Daerah Kota Palangkaraya; Sekretariat DPRD Kota Palangkaraya; Inspektorat; Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; Dinas Perpustakaan dan Kearsipan; Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah; badan Kesatuan Bangsa dan Politik; Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan; Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah; Satuan Polisi Pamong Praja; dan Kecamatan.<sup>136</sup>

---

<sup>135</sup> Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palangkaraya Nomor 188.4.43/19/DPRD/2019 Tentang Penetapan Pembentukan Dan Susunan Pimpinan Dan Keanggotaan Komisi A, Komisi B Dan Komisi C DPRD Kota Palangkaraya Masa Jabatan 2019-2020. Lampiran II. Hlm: 2.

<sup>136</sup> *Ibid.* Lampiran III. Hlm: 4.



**Gambar 3.20** Keanggotaan Komisi A

**Sumber:** Dokumentasi pribadi

**b. Komisi B (Bidang Perekonomian dan Pembangunan)**

**Bidang Tugas:** Urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang; Urusan pemerintahan bidang perindustrian; Urusan pemerintah bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah; Urusan pemerintahan bidang perdagangan; Urusan pemerintah bidang komunikasi dan informatika; Urusan pemerintahan bidang statistic; Urusan pemerintahan bidang persandian; Penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, dan bidang penelitian dan pengembangan; Urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup; Urusan pemerintahan bidang perhubungan; Urusan pemerintahan



bidang energi dan sumber daya mineral; Urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman; Urusan pemerintahan bidang pertanian, dan ketahanan pangan; dan Urusan pemerintahan bidang perikanan, dan kehutanan.<sup>137</sup>

**Mitra Kerja:** Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan pemukiman; Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; Dinas Perindustrian dan Perdagangan; Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; Dinas Perhubungan; Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian; Dinas Lingkungan Hidup; Dinas Perikanan; Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian; Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; dan Badan Penelitian dan Pengembangan.<sup>138</sup>



KOMISI B BIDANG PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN		
1	HENI ADRIATI LAMBUNG, LK, RAJ	KETUA
2	SUSI IDAWATI, S.P	WAKIL KETUA I
3	ARTHUR APRIOSSI TUWAN	WAKIL KETUA II
4	MORHAINI	SEKRETARIS
5	TED AFRIY NAWENDRA, S.E., M.Si	ANGGOTA
6	RUSELITA, S.H	ANGGOTA
7	JUM'ATHI	ANGGOTA
8	HERI PURWANTO	ANGGOTA
9	YUDHI KARLIANTO MANAN	ANGGOTA
10	HR. KHEMAL NASERY	ANGGOTA

**Gambar 3.21** Keanggotaan Komisi B

**Sumber:** Dokumentasi pribadi

<sup>137</sup> Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palangkaraya Nomor 188.4.43/19/DPRD/2019 Tentang Penetapan Pembentukan Dan Susunan Pimpinan Dan Keanggotaan Komisi A, Komisi B Dan Komisi C DPRD Kota Palangkaraya Masa Jabatan 2019-2020. Lampiran II. Hlm: 2.

<sup>138</sup> *Ibid*, Lampiran III. Hlm: 4.

**c. Komisi C (Bidang Kesejahteraan Rakyat)**

**Bidang Tugas:** Urusan pemerintahan bidang tenaga kerja; Urusan pemerintahan bidang pendidikan; Urusan pemerintahan bidang social; Urusan pemerintahan bidang kesehatan; Urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat; Urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana; Urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; Urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga; Urusan pemerintahan bidang transmigrasi; dan Urusan pemerintahan bidang pariwisata.<sup>139</sup>

**Mitra Kerja:** Dinas Kebudayaan dan Pariwisata; Dinas Kesehatan; Dinas Sosial; Dinas Tenaga Kerja; Dinas Kepemudaan dan Olahraga; Dinas Pendidikan; Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan; dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.<sup>140</sup>

---

<sup>139</sup> Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palangkaraya Nomor 188.4.43/19/DPRD/2019 Tentang Penetapan Pembentukan Dan Susunan Pimpinan Dan Keanggotaan Komisi A, Komisi B Dan Komisi C DPRD Kota Palangkaraya Masa Jabatan 2019-2020. Lampiran II. Hlm: 3.

<sup>140</sup> *Ibid*, Lampiran III. Hlm: 4.

KOMISI C BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT		
1	BETA SYAILENDRA, S.E	KETUA
2	Ir. M. HASAN BUSYAIRI, M.A.P	WAKIL KETUA I
3	SHOPIE ARIANY SITORUS, S.T	WAKIL KETUA II
4	JUNITA BR. GINTING, S.Si	SEKRETARIS
5	RIDUANTO, S.E	ANGGOTA
6	SIGIT WIDODO, S.Pd	ANGGOTA
7	Dra. ANNA AGUSTINA ELSYE	ANGGOTA
8	DUDIE B. SIDAU, S.E	ANGGOTA
9	HJ. MUKARRAMAH, S.Pd., M.A.P	ANGGOTA

**Gambar 3.22** Keanggotaan Komisi C

**Sumber:** Dokumentasi pribadi

#### **D. Sekretariat Daerah Kota Palangkaraya**

Berdasarkan Peraturan Walikota Palangkaraya Nomor 51 Tahun 2016 Tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Palangkaraya, maka susunan organisasi di lingkungan Sekretariat Daerah terdiri atas Sekretaris dan Asisten. Asisten terdiri dari: (1) Asisten Pemerintahan, (2) Asisten Ekonomi Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat, (3) Asisten Administrasi Umum.

Adapun tugas dari Sekretaris Daerah sesuai dengan yang dijelaskan pada Peraturan Walikota tersebut yaitu membantu Walikota dalam penyusunan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas, pelayanan administratif dan pembinaan aparatur, pemantauan dan evaluasi Perangkat Daerah. Pejabat

yang menjabat sebagai Sekretaris Daerah Kota Palangkaraya adalah Hera Nugrahayu, yang mana telah dilantik pada 15 April 2019 lalu.<sup>141</sup>



**Gambar 3.23** Sekretaris Daerah Kota Palangkaraya

**Sumber:** Dokumentasi pribadi

## **E. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Palangkaraya**

### **1. Tugas Pokok dan Fungsi**

Kepala BAPPEDA Kota Palangkaraya mempunyai tugas pokok menetapkan, menyelenggarakan dan mensosialisasikan kebijakan Penyusunan Data Pemabngunan, Penyusunan Program Pembangunan dan Program Kerja Pembangunan Pemerintah daerah. Dalam melaksanakan tugas

<sup>141</sup> <https://kalteng.antaranews.com/berita/316016/hera-nugrahayu-terpilih-jadi-sekda-kota-palangka-raya> diakses pada 13 Februari 2020.

pokoknya, Kepala Badan dibantu oleh: Sekretariat. Bidang Perekonomian, Kesra dan Pengendalian. Bidang Sarana dan Prasarana. Dan Bidang Penyusunan Program.<sup>142</sup>

Sekretaris BAPPEDA Kota Palangkaraya mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan administrasi kepada semua unsur di Lingkungan BAPPEDA Kota Palangkaraya meliputi administrasi umum, Kepegawaian, Keuangan, Urusan perencanaan, evaluasi dan mengkoordinir penyusunan RENJA, RENSTRA, SAKIP, LAKIP, dan menyiapkan LKPI, LPPD, menyusun SPM, SOP, RKA serta DPA di Lingkungan BAPPEDA Kota Palangkaraya. Dalam melaksanakan tugas pokoknya, sekretaris dibantu oleh Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset, serta Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.<sup>143</sup>

Kepala Bidang Perekonomian, Kesra dan Pengendalian mempunyai tugas merumuskan kebijakan perencanaan program dan kegiatan pembangunan daerah di Bidang Perekonomian, Koperasi, Industri Perdagangan, Kesejahteraan Rakyat, Pengendalian dan Evaluasi. Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Kepala Bidang dibantu oleh<sup>144</sup>:

- a. Kepala Sub Bidang Koperasi, Industri Perdagangan dan Sumber Daya Alam.
- b. Kepala Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi.
- c. Kepala Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Pemerintahan.

---

<sup>142</sup><https://bappeda.palangkaraya.go.id/kepala-badan/> diakses pada 13 Oktober 2019.

<sup>143</sup><https://bappeda.palangkaraya.go.id/sekretariat/> diakses pada 13 Oktober 2019.

<sup>144</sup><https://bappeda.palangkaraya.go.id/ekonomi-kesra-dan-pengendalian/> diakses pada 13 Oktober 2019.

Kepala Bidang Sarana dan Prasarana mempunyai tugas pokok merumuskan, mengembangkan dan mensosialisasikan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, sosialisasi dan pembinaan teknis dan penyusunan rencana makro pembangunan daerah dan pengembangan kawasan bidang kebinamargaan, keciptakarya (Urusan Pekerjaan Umum), serta perencanaan makro rencana tata ruang wilayah dan lingkungan hidup, sumber daya air, perumahan dan perhubungan. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Bidang dibantu oleh<sup>145</sup>:

- a. Kepala Sub Bagian Bina Marga, Sumber Daya Alam dan Perhubungan.
- b. Kepala Sub Bidang Cipta Karya dan Perumahan.
- c. Kepala Sub Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup.

Kepala Bidang Penyusunan Program mempunyai tugas merumuskan, mengembangkan dan mensosialisasikan kebijakan Penyusunan Data Pembangunan, Penyusunan Program Pembangunan dan Program Kerja Pembangunan Pemerintah Daerah. Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Kepala Bidang dibantu oleh Kepala Sub Bidang Program Pembangunan, Kepala sub Bidang Program Kerja, dan Kepala Sub Bidang Data Pembangunan.<sup>146</sup>

---

<sup>145</sup> <https://bappeda.palangkaraya.go.id/sarana-dan-prasarana/> diakses pada 13 Oktober 2019.

<sup>146</sup> <https://bappeda.palangkaraya.go.id/penyusunan-program/> diakses pada 13 Oktober 2019.

## 2. Visi dan Misi

Visi dari BAPPEDA Kota Palangkaraya adalah: *“Terwujudnya perencanaan pembangunan yang berkualitas, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan komprehensif”*.<sup>147</sup>

Adapun Misi BAPPEDA Kota Palangkaraya yakni<sup>148</sup>:

- a. Mewujudkan sumber daya manusia perencana pembangunan daerah yang berkualitas dan profesional.
- b. Mewujudkan rencana pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
- c. Meningkatkan koordinasi perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan.
- d. Mewujudkan penanaman modal, penelitian dan pengembangan informasi/data statistik daerah untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.
- e. Meningkatkan kualitas pelayanan.

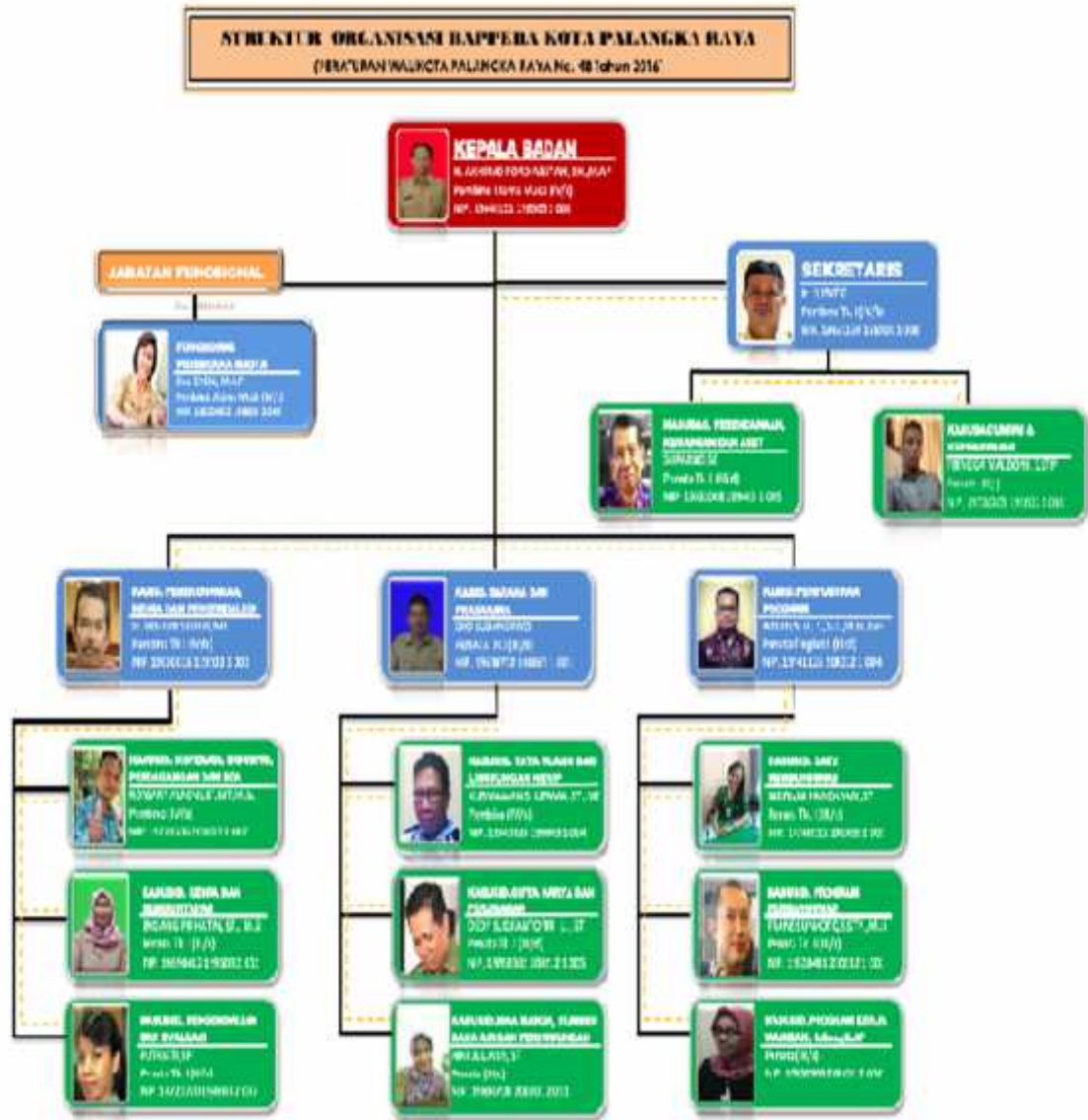
---

<sup>147</sup> <https://bappeda.palangkaraya.go.id/profil/visi-dan-misi/> diakses pada 13 Oktober 2019.

<sup>148</sup> *Ibid.*



### 3. Struktur Organisasi



**Gambar 3.24** Struktur Organisasi BAPPEDA Kota Palangkaraya

Sumber: <https://bappeda.palangkaraya.go.id/profil/struktur-organisasi/>

## **F. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Palangkaraya**

### **1. Tugas Pokok dan Fungsi**

Berdasarkan Peraturan daerah Kota Palangkaraya Nomor 11 tahun 2016, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Palangkaraya mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian sesuai dengan wewenang daerah yang meliputi perencanaan, pengembangan dan pengelolaan komunikasi, informatika, statistik dan persandian.<sup>149</sup>

Dalam melaksanakan tugas pokok, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Palangkaraya menyelenggarakan fungsi<sup>150</sup>:

- a. Merumuskan kebijakan teknis, pemberian bimbingan dan pembinaan di bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian.
- b. Merumuskan kebijakan di bidang tugasnya sesuai dengan ketentuan dan kebijakan umum yang ditetapkan Walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Melakukan pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana dilingkup bidang tugasnya.
- d. Melaksanakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinkronisasi di bidang tugasnya.
- e. Melaksanakan kegiatan pembinaan dan upaya-upaya pengaman dan ketertiban sarana dan prasarana bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian.

---

<sup>149</sup> <https://kominfo.palangkaraya.go.id/profil/tupoksi/> diakses pada 13 Oktober 2019.

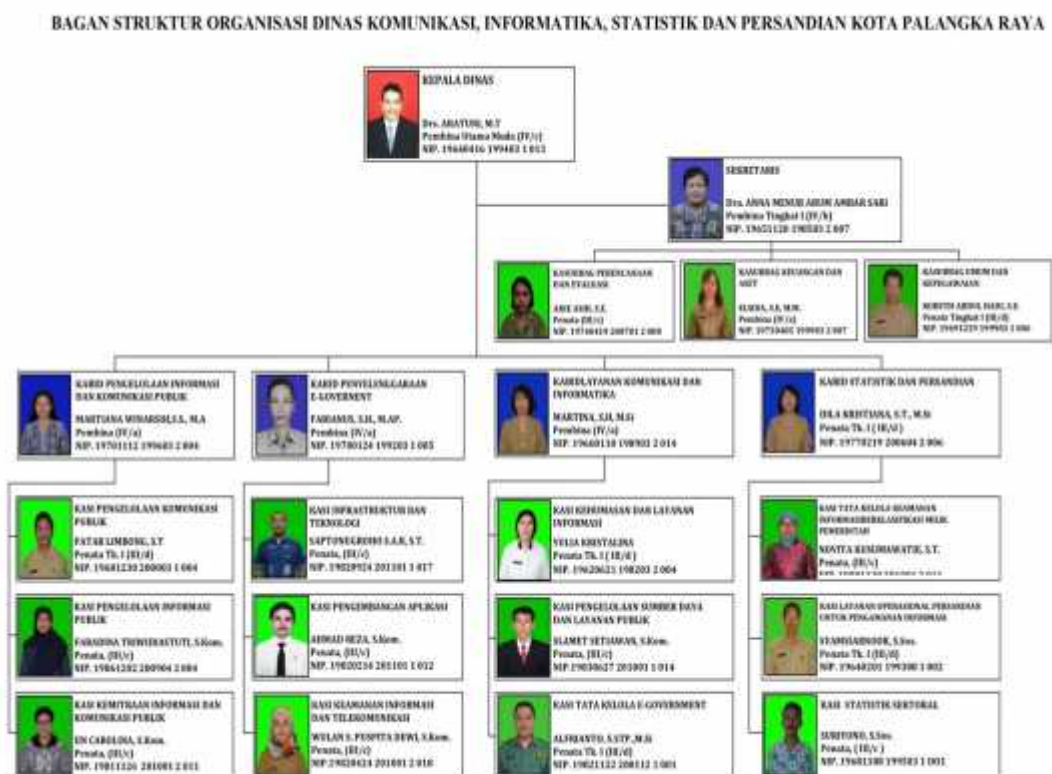
<sup>150</sup> Ibid.

## 2. Visi dan Misi

Visi dan Misi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Palangkaraya adalah<sup>151</sup>:

- a. Visi: *“Terwujudnya Kota Palangkaraya sebagai Kota Pendidikan, Jasa dan Pariwisata yang Berwawasan Lingkungan Berdasarkan Falsafah Budaya Betang”*.
- b. Misi: *“Mewujudkan Pemerataan Sarana dan Prasarana Publik yang Berkualitas Berdasarkan Tata Kelola Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan”*.

## 3. Struktur Organisasi



**Gambar 3.25** Struktur Organisasi Diskominfo Kota Palangkaraya

Sumber: <https://kominfo.palangkaraya.go.id/profil/struktur-organisasi/>

<sup>151</sup> <https://kominfo.palangkaraya.go.id/profil/visi-dan-misi/> diakses pada 13 Oktober 2019.

## **G. Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Palangkaraya**

### **1. Tugas Pokok dan Fungsi**

Berdasarkan Peraturan Walikota Palangkaraya Nomor 188.45/20/2017 Tentang Optimalisasi Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Palangkaraya dalam Pengkajian dan Perumusan Kebijakan Pembangunan Daerah Kota Palangkaraya, maka tugas pokok Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Palangkaraya adalah melaksanakan urusan Pemerintah Kota Palangkaraya dalam melakukan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penelitian dan pengembangan; dan melaksanakan tugas yang diberikan oleh walikota sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

Adapun dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana yang dimaksud diatas, maka Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Palangkaraya menyelenggarakan fungsi, sebagai berikut:

- a. Perencanaan strategis Kelitbangan pada Badan Penelitian dan Pengembangan.
- b. Perumusan kebijakan teknis bidang penelitian dan pengembangan.
- c. Pengumpulan, pengelolaan dan pengendalian data berbentuk *data base* serta analisis data untuk menyusun program kegiatan.
- d. Pengkajian dari hasil Kelitbangan.
- e. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang penelitian dan pengembangan.
- f. Pelaksanaan pengawasan, pengendalian serta evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan bidang penelitian dan pengembangan.

- g. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan pada Badan Penelitian dan Pengembangan.
- h. Pemberian rekomendasi, fasilitas dan evaluasi pelaksanaan pelayanan bidang penelitian dan pengembangan.
- i. Penggunaan dan pelaksanaan kerjasama dengan masyarakat, Lembaga Pemerintah dan Perguruan Tinggi Negeri/Perguruan Tinggi Swasta serta lembaga lainnya.

## 2. Visi dan Misi

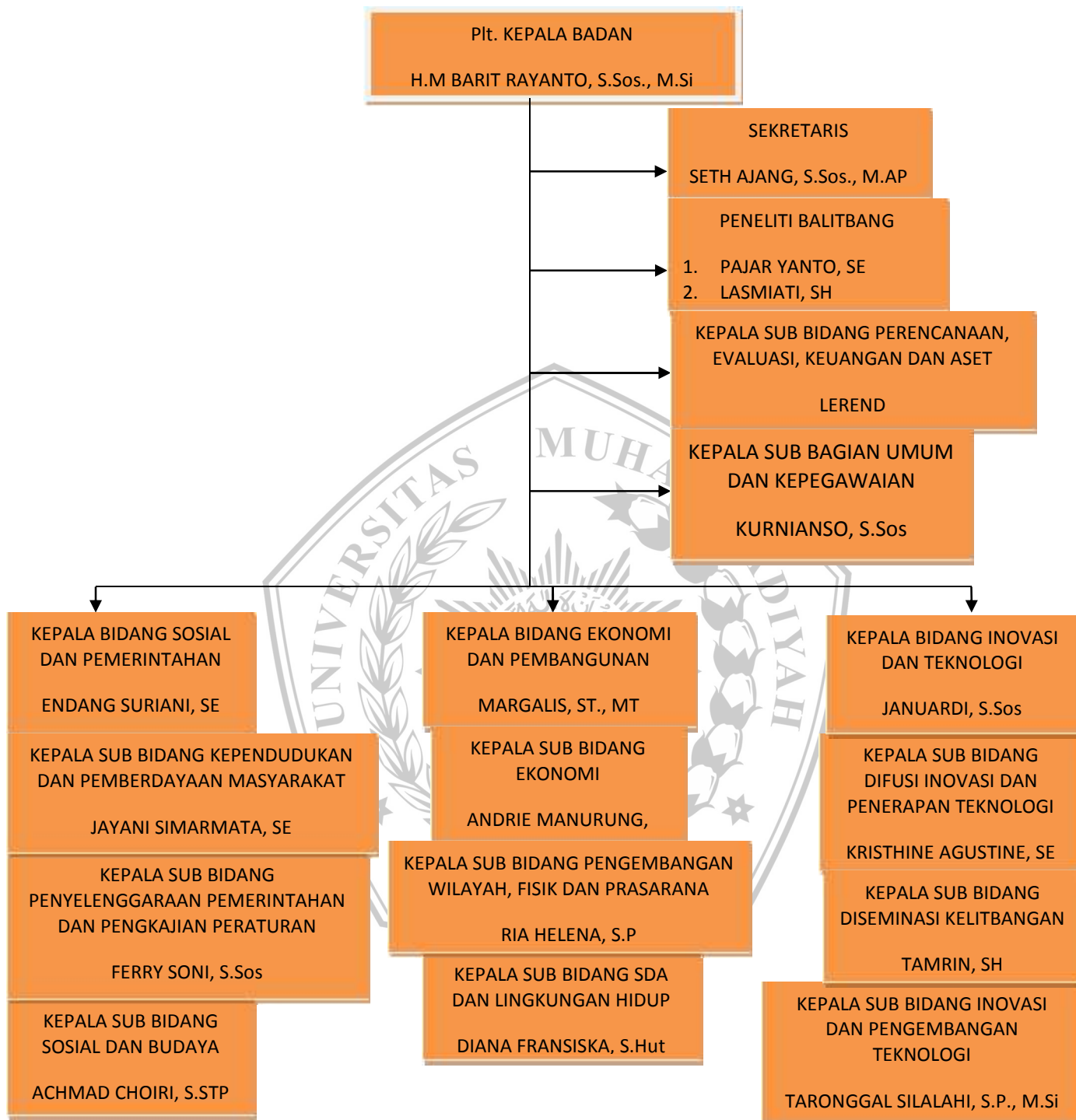
Visi dan Misi Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Palangkaraya adalah sebagai berikut<sup>152</sup>:

- a. Mewujudkan Kota Palangkaraya sebagai kota pendidikan dan pusat pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas.
- b. Mewujudkan Kota Palangkaraya sebagai kota jasa dan destinasi wisata menuju kemandirian ekonomi masyarakat.
- c. Mewujudkan pemerataan sarana dan prasarana publik yang berkualitas berdasarkan tata kelola sumber daya alam yang berkelanjutan.
- d. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good and clean governance*).
- e. Mewujudkan masyarakat yang berbudaya, harmonis, dinamis dan damai berdasarkan filosofi huma betang.

---

<sup>152</sup> <https://balitbangkota.palangkaraya.go.id/> diakses pada 23 Desember 2019.

### 3. Struktur Organisasi



**Gambar 3.26** Struktur Organisasi Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Palangkaraya

Sumber: <https://balitbangkota.palangkaraya.go.id/>